

## Memahami Etika Politik Kontemporer

Muhammad Fardhannajmi<sup>1</sup>, Muhammad Rizky Darmawan<sup>2</sup>, Rayhan Noor<sup>3</sup>,  
Surya Sukti<sup>4</sup>

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

\*Email Korespondensi: [mrizkydarmawann7@gmail.com](mailto:mrizkydarmawann7@gmail.com)

Diterima: 29-05-2026 | Disetujui: 07-06-2026 | Diterbitkan: 09-07-2026

### ABSTRACT

*This study examines the relationship between ethics and politics as fundamental dimensions of human social life, emphasizing their role in shaping just and responsible governance. Ethics, as a branch of philosophy, provides moral principles that guide human behavior, while politics functions as the practical sphere in which power, decision-making, and public policies are exercised. The study explores classical and modern perspectives, including Aristotle's view of the unity of ethics and politics in achieving the highest good, Machiavelli's pragmatic approach that separates morality from political necessity, and Kant's insistence on universal moral principles in political action. Furthermore, the discussion extends to contemporary political ethics, highlighting key issues such as justice, human rights, transparency, accountability, and the influence of digital technology. The ideas of John Rawls and Jürgen Habermas are examined to demonstrate the importance of fairness, equality, and participatory dialogue in modern governance. Central to this study is the concept of the common good, which serves as a core political value aimed at ensuring collective welfare and social justice. The study concludes that ethics and politics are inherently interconnected and must be integrated to prevent the misuse of power and to promote inclusive and equitable governance. A strong ethical foundation, supported by democratic institutions and active public participation, is essential for realizing the common good in contemporary society.*

**Keywords:** Understanding ; Contemporary; Political; Ethics.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hubungan antara etika dan politik sebagai dimensi fundamental dalam kehidupan sosial manusia, dengan menekankan perannya dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Etika, sebagai cabang filsafat, menyediakan prinsip-prinsip moral yang membimbing perilaku manusia, sedangkan politik berfungsi sebagai ruang praktis tempat kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan publik dijalankan. Kajian ini mengeksplorasi perspektif klasik dan modern, termasuk pandangan Aristoteles mengenai kesatuan etika dan politik dalam mencapai kebaikan tertinggi, pendekatan pragmatis Machiavelli yang memisahkan moralitas dari kebutuhan politik, serta penegasan Kant mengenai pentingnya prinsip-prinsip moral universal dalam tindakan politik. Lebih lanjut, pembahasan diperluas pada etika politik kontemporer dengan menyoroti isu-isu utama seperti keadilan, hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan pengaruh perkembangan teknologi digital. Pemikiran John Rawls dan Jürgen Habermas dianalisis untuk menunjukkan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan dialog partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Konsep kebaikan bersama (common good) menjadi fokus utama dalam kajian ini karena dipandang sebagai nilai politik yang bertujuan menjamin kesejahteraan kolektif dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika dan politik pada hakikatnya saling berkaitan dan harus diintegrasikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, landasan etika yang kuat, didukung oleh institusi demokrasi yang kokoh dan partisipasi aktif masyarakat, merupakan syarat

penting dalam mewujudkan kebaikan bersama di tengah dinamika masyarakat kontemporer

**Katakunci:** Memahami Etika; Politik; kontemporer.

## PENDAHULUAN

Etika politik merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan pemerintahan. Etika politik berfungsi untuk mengarahkan penggunaan kekuasaan agar tetap berorientasi pada kepentingan umum, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dalam sistem demokrasi, etika politik memiliki peran yang sangat penting karena menjadi landasan bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat. Namun, realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa berbagai persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, politik uang, penyebaran hoaks, dan konflik kepentingan masih sering terjadi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan etika politik belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, memahami etika politik menjadi hal yang penting untuk membangun kesadaran politik yang berintegritas dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Kajian mengenai etika politik telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Farah Sabilla Febriany dan Dinie Anggraeni Dewi (2021) menjelaskan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai landasan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa etika politik merupakan bagian dari filsafat moral yang mengatur kehidupan politik, serta bahwa nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi dalam memperbaiki kualitas etika politik di Indonesia. (Farah Sabilla Febriany, 2020) Sementara itu, penelitian Ahmad Bashori dan Zainun Kamaluddin Fakhri (2021) mengenai pemikiran Bahtiar Effendy menegaskan bahwa moralitas, etika, dan tanggung jawab politik merupakan unsur penting dalam menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat. Penelitian tersebut juga menunjukkan pentingnya menghubungkan antara kekuasaan politik dan nilai-nilai moral agar praktik politik tidak terjebak pada kepentingan pragmatis semata. (Ahmad Bashori, 2022)

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas etika politik dari berbagai sudut pandang, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Jika penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam etika politik atau pemikiran tokoh tertentu, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep etika politik, fungsi etika politik dalam kehidupan demokrasi, serta relevansinya dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman mengenai pentingnya etika politik sebagai landasan perilaku politik yang berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep etika politik dipahami, bagaimana peran etika politik dalam kehidupan demokrasi, dan bagaimana pentingnya etika politik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun hipotesis penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat pemahaman seseorang terhadap etika politik, maka semakin tinggi pula kesadaran dan komitmennya untuk mendukung praktik politik yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konsep dasar etika politik, menganalisis peran etika politik dalam sistem demokrasi, serta menjelaskan pentingnya etika politik dalam membangun kehidupan politik yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian etika politik kontemporer menitikberatkan pada analisis konsep, nilai, dan norma yang berkembang dalam pemikiran politik modern. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi relevan mengenai topik etika politik Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi,

memeriksa, dan mengkategorikan berbagai sumber yang berkaitan dengan etika politik kontemporer. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu dengan menyajikan secara sistematis konsep-konsep etika politik kemudian menganalisisnya untuk mengidentifikasi relevansi dan implikasinya dalam praktik politik modern. Pendekatan konseptual juga digunakan untuk memahami berbagai teori etika politik dari para pemikir utama.

Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya etika dalam praktik politik kontemporer. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menawarkan pemahaman menyeluruh dan kontribusi akademis bagi perkembangan kajian etika politik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kehidupan politik di era kontemporer menghadirkan berbagai tantangan baru yang semakin kompleks dan dinamis. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta berkembangnya media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam praktik politik modern. Di satu sisi, perkembangan tersebut membuka ruang yang lebih luas bagi demokrasi, transparansi, dan keterlibatan publik dalam proses politik. Namun, di sisi lain, berbagai persoalan seperti penyebaran disinformasi, politik identitas, korupsi, konflik kepentingan, serta penyalahgunaan kekuasaan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks ini, etika politik kontemporer menjadi sangat penting sebagai landasan moral yang mengarahkan perilaku aktor politik dan penyelenggara negara agar tetap berorientasi pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan kepentingan umum. Oleh karena itu, pembahasan mengenai etika politik kontemporer diperlukan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip etika dapat diterapkan dalam menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan politik yang berkembang di era modern.

### Pengertian Etika Dan Politik

Secara umum, etika dapat dipahami sebagai cabang filsafat yang membahas nilai-nilai moral yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika berupaya menjawab pertanyaan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam berbagai situasi. Dalam konteks ini, etika tidak hanya bersifat normatif tetapi juga reflektif, karena mendorong pemikiran kritis terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat (K. Bertens, 2000).

Secara etimologis, kata "etika" berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan, watak, atau disposition. Dalam perkembangan pemikiran filsafat, etika sering disandingkan dengan moral, meskipun keduanya berbeda. Moral lebih merujuk pada praktik atau aturan konkret dalam masyarakat, sedangkan etika merupakan refleksi filsafat terhadap moral tersebut. Dengan demikian, etika berfungsi sebagai panduan sekaligus alat untuk menilai perilaku manusia (Kornelius Naitili1, 2023).

Sementara itu, politik adalah proses atau aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pengelolaan kehidupan bersama dalam masyarakat atau negara. Politik mencakup berbagai aspek seperti pemerintahan, kebijakan publik, distribusi kekuasaan, dan hubungan antara negara dengan warga negara. Dalam arti luas, politik tidak terbatas pada aktivitas pemerintahan tetapi juga mencakup interaksi sosial yang melibatkan kepentingan dan kekuasaan (Budiardjo, 2008).

Menurut pandangan klasik, politik dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh para filsuf seperti Aristotle, yang menyatakan bahwa manusia adalah

hewan politik (zoon politikon), sehingga kehidupan kenegaraan menjadi sarana untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan adil. Dalam konteks modern, politik sering dipandang lebih pragmatis sebagai arena persaingan kekuasaan dan kepentingan antarindividu atau kelompok (Strang, n.d.).

Dengan demikian, etika dan politik saling berkaitan erat. Etika memberikan fondasi moral bagi praktik politik agar tidak melenceng dari nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Tanpa etika, politik berisiko menjadi alat kekuasaan yang manipulatif dan merugikan masyarakat. Sebaliknya, tanpa politik, nilai-nilai etis sulit diimplementasikan secara luas dalam kehidupan negara. Oleh karena itu, pemahaman integratif antara etika dan politik sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan adil.

### **Etika Politik Menurut Para Filsuf**

Etika politik adalah cabang filsafat moral yang mengkaji dimensi moral dari kehidupan politis, termasuk legitimasi kekuasaan, keadilan, tanggung jawab publik, dan tujuan bersama dari negara. Etika politik tidak hanya mengatur perilaku individu tetapi juga struktur sosial dan tindakan kolektif, sehingga memerlukan proses persuasi agar dapat diterima oleh masyarakat. Tanpa penerapan etika politik, kehidupan bernegara dapat menjadi kacau akibat penyalahgunaan kekuasaan, sementara tujuannya adalah menciptakan lingkungan politik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab serta memperluas kebebasan masyarakat.

Plato dalam karyanya *The Republic* menekankan bahwa politik harus dipimpin oleh filsuf-raja yang memiliki pengetahuan tentang yang Baik (the Good). Bagi Plato, keadilan adalah harmoni antara tiga bagian jiwa: akal, semangat, dan nafsu, yang juga tercermin dalam struktur negara, dan tujuan negara adalah mencapai kebaikan bersama bukan sekadar kekuasaan atau kekayaan. Aristoteles melanjutkan pemikiran ini dengan menyatakan bahwa manusia adalah zoon politikon (makhluk politik) sehingga hidup bermasyarakat adalah kodrat alami manusia. Dalam pandangan Aristoteles, politik adalah sarana untuk mencapai eudaimonia (kehidupan yang baik dan bahagia), dengan etika dan politik yang tidak terpisahkan di mana etika membahas kebaikan individu sedangkan politik membahas kebaikan komunitas, serta menekankan pentingnya keadilan distributif dan peran warga dalam pemerintahan. (Plato, 2019)

Niccolò Machiavelli dalam *The Prince* membawa pandangan berbeda dengan memisahkan politik dari moralitas konvensional, dengan prinsip bahwa tujuan membenarkan sarana. Ia berpendapat bahwa pemimpin harus pragmatis: lebih baik ditakuti daripada dicintai selama tidak dibenci, dengan fokus pada stabilitas kekuasaan dan kelangsungan negara, sehingga pandangannya sering dikritik karena dianggap amoral namun menekankan realisme politik. Thomas Hobbes dalam *Leviathan* berpendapat bahwa dalam keadaan alamiah (state of nature), kehidupan manusia adalah soliter, miskin, nasty, brutish, and short, sehingga untuk menghindari kekacauan manusia membuat kontrak sosial dan menyerahkan hak kepada penguasa mutlak (Leviathan), dengan etika politik berfokus pada perlindungan (order) dan keamanan. (Machiavelli, 1908).

John Locke dalam *Two Treatises of Government* menegaskan bahwa manusia memiliki hak alamiah yaitu kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan, dan pemerintah dibentuk melalui kontrak sosial untuk melindungi hak-hak ini. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, rakyat memiliki hak untuk memberontak, sehingga Locke menegaskan pemerintahan konstitusional dan pemisahan kekuasaan. Jean-Jacques Rousseau dalam *The Social Contract* menyatakan bahwa manusia lahir bebas tetapi di manapun ia berada dalam belenggu, dengan kehendak umum (volonté générale) sebagai dasar legitimasi politik.

Pemerintah harus mencerminkan kehendak rakyat bukan kepentingan elit, dan pemikiran ini menginspirasi revolusi demokrasi modern (Locke, 1988).

Immanuel Kant dalam *Perpetual Peace* dan *Groundwork of the Metaphysics of Morals* menekankan prinsip moral utama berupa imperatif kategoris: bertindaklah sesuai prinsip yang dapat menjadi hukum universal. Bagi Kant, politik harus konform dengan moralitas dan tidak ada pemisahan antara etika dan politik, serta ia menegaskan hak asasi manusia, republikanisme, dan perdamaian abadi. Karl Marx dalam *The Communist Manifesto* dan *Das Kapital* memandang politik sebagai cerminan pertentangan kelas, di mana negara adalah alat dominasi kelas borjuis terhadap proletar. Etika politik menurut Marx harus bertujuan pada emansipasi kelas pekerja dan penghapusan eksploitasi, sehingga ia mengkritik kapitalisme dan mendorong revolusi sosial (Kant, 1968).

Franz Magnis-Suseno dalam karyanya *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* membawa pandangan yang sangat relevan dengan konteks Indonesia. Etika politik dalam pandangannya bertujuan memberikan orientasi moral dan membimbing legitimasi kekuasaan, dengan tiga aspek penting: legitimasi kekuasaan harus berdasarkan keadilan, politik sebagai sarana mewujudkan martabat manusia, serta keterlibatan kritis masyarakat dalam proses politik. Pemikirannya mengarahkan politik pada *bonum commune* (kebaikan bersama) dan memiliki relevansi tinggi bagi konteks politik Indonesia terutama di tengah fenomena politik identitas, polarisasi, dan lemahnya etika publik (Kornelius Naitili, 2023).

Secara keseluruhan, pandangan para filsuf tentang etika politik menunjukkan spektrum yang luas dari Plato dan Aristoteles yang menyatukan etika dengan politik, hingga Machiavelli yang memisahkannya, serta Locke, Rousseau, dan Kant yang menekankan hak dan moralitas dalam pemerintahan. Marx menghadirkan perspektif kelas sedangkan Magnis-Suseno memberikan perspektif kontekstual untuk Indonesia. Politik tanpa etika menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan kehancuran legitimasi, sehingga etika politik tetap diperlukan untuk menciptakan lingkungan politik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, terutama di Indonesia untuk mengatasi politik identitas, polarisasi, dan lemahnya etika publik.

### **Etika Politik Kontemporer**

Etika politik kontemporer merupakan cabang kajian dalam filsafat politik yang berfokus pada refleksi moral terhadap praktik kekuasaan, kebijakan publik, serta hubungan antara negara dan warga negara dalam konteks modern. Di era globalisasi, demokratisasi, dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, etika politik tidak lagi hanya membahas legitimasi kekuasaan, tetapi juga mencakup isu-isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Etika politik kontemporer berupaya menjawab pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan secara moral dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang pluralistik dan kompleks (Heywood, 2015).

Dalam perkembangan pemikiran modern, etika politik kontemporer sangat dipengaruhi oleh konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajiban) yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls menekankan bahwa struktur dasar masyarakat harus disusun sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung, sekaligus menjamin kebebasan dasar yang setara bagi setiap individu (John Rawls, 1971). Selain itu, gagasan Jürgen Habermas juga memberikan kontribusi penting melalui teori tindakan komunikatif (*theory of communicative action*), yang menekankan pentingnya dialog rasional dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan politik sebagai dasar legitimasi kekuasaan (Habermas, 1996).

Di sisi lain, etika politik kontemporer juga menghadapi berbagai tantangan serius, seperti korupsi, populisme, penyalahgunaan kekuasaan, serta krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Dalam konteks ini, etika politik berfungsi sebagai alat kritis untuk mengevaluasi praktik-praktik politik yang menyimpang dari prinsip-prinsip moral. Pendekatan etis tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praktis, dengan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum (*rule of law*), dan partisipasi masyarakat yang luas (Dahl, 1989).

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital telah menghadirkan dimensi baru dalam etika politik kontemporer, termasuk persoalan privasi data, manipulasi informasi (*disinformasi*), dan pengaruh media sosial terhadap pembentukan opini publik. Fenomena-fenomena tersebut menuntut adanya kerangka etika yang mampu mengatur interaksi politik di ruang digital agar tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kebenaran. Dengan demikian, etika politik kontemporer tidak hanya relevan dalam tataran teoritis, tetapi juga berperan sebagai pedoman penting dalam menghadapi dinamika politik modern yang semakin kompleks dan dinamis (Castells, 2012).

### **Kebaikan Bersama Sebagai Nilai-nilai Politik**

Kebaikan bersama (*common good*) merupakan salah satu konsep fundamental dalam etika politik yang merujuk pada kondisi sosial yang memungkinkan setiap individu dalam masyarakat mencapai kesejahteraan dan perkembangan diri secara optimal. Dalam konteks politik, kebaikan bersama menjadi tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan negara, di mana kebijakan publik tidak hanya diarahkan pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi pada kesejahteraan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Konsep ini menegaskan bahwa politik bukan sekadar arena perebutan kekuasaan, melainkan juga sarana untuk mewujudkan kehidupan bersama yang adil, harmonis, dan bermartabat (Heywood, 2019).

Secara filosofis, gagasan tentang kebaikan bersama telah berkembang sejak pemikiran klasik. Aristoteles, misalnya, berpendapat bahwa negara (*polis*) dibentuk untuk mencapai kehidupan yang baik (*eudaimonia*), yang hanya dapat terwujud melalui partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik (Aristoteles, 2000). Dalam pandangan ini, kepentingan individu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolektif karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial dan politik (*zoon politikon*). Oleh karena itu, kebijakan politik harus mencerminkan keseimbangan antara hak-hak individu dan tanggung jawab sosial guna mencapai kesejahteraan umum.

Dalam perkembangan modern, konsep kebaikan bersama juga mendapat perhatian dalam etika politik kontemporer. Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, misalnya, menekankan pentingnya prinsip *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajiban), yaitu bahwa struktur dasar masyarakat harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (John Rawls, 1971). Hal ini menunjukkan bahwa kebaikan bersama tidak hanya diukur dari tingkat kemakmuran secara umum, tetapi juga dari sejauh mana keadilan sosial ditegakkan dalam distribusi sumber daya dan kesempatan.

Lebih lanjut, dalam perspektif politik demokratis, kebaikan bersama diwujudkan melalui proses partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Nilai ini menuntut adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat dalam perumusan kebijakan agar keputusan politik benar-benar mencerminkan aspirasi kolektif. Dengan demikian, kebaikan bersama bukanlah konsep yang statis, melainkan dinamis dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Kymlicka, 2002). Namun, implementasi kebaikan bersama dalam praktik politik sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik kepentingan, dominasi kelompok tertentu, dan korupsi kekuasaan. Dalam kondisi demikian, nilai kebaikan bersama dapat mengalami distorsi menjadi kepentingan sempit yang mengabaikan keadilan dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen etis

dari para pemimpin politik serta penguatan institusi demokrasi agar kekuasaan benar-benar dijalankan untuk kepentingan seluruh rakyat.

Pada akhirnya, kebaikan bersama sebagai nilai politik menegaskan bahwa tujuan utama politik adalah menciptakan kondisi kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat bagi semua orang. Nilai ini menjadi landasan moral yang harus menuntun setiap tindakan dan kebijakan politik agar kekuasaan tidak disalahgunakan, melainkan diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan kolektif dalam kehidupan bernegara.

## KESIMPULAN

Pada dasarnya, etika dan politik merupakan dua dimensi yang saling berkaitan dalam kehidupan sosial manusia. Etika menyediakan kerangka moral yang membimbing perilaku manusia dengan membedakan antara yang benar dan yang salah, sedangkan politik menjadi arena praktis tempat kekuasaan, pemerintahan, dan pengambilan keputusan publik dijalankan. Tanpa landasan etika, praktik politik berisiko menjadi sarana manipulasi dan ketidakadilan. Sebaliknya, tanpa struktur politik, nilai-nilai etika tidak dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan bersama. Pandangan para filsuf besar menunjukkan hubungan yang dinamis antara etika dan politik, mulai dari Aristoteles yang melihat keduanya sebagai satu kesatuan dalam mencapai kebaikan tertinggi, Machiavelli yang memisahkan moralitas dari kebutuhan politik yang bersifat pragmatis, hingga Kant yang menegaskan pentingnya prinsip-prinsip moral universal sebagai dasar tindakan politik. Berbagai pandangan tersebut mencerminkan adanya ketegangan yang terus berlangsung antara idealisme dan realisme dalam praktik politik.

Dalam konteks kontemporer, etika politik berkembang untuk menjawab berbagai persoalan yang semakin kompleks, seperti keadilan, hak asasi manusia, transparansi, akuntabilitas, serta dampak perkembangan teknologi digital. Pemikir seperti John Rawls dan Jürgen Habermas menekankan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan dialog partisipatif sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang etis.

Pada akhirnya, konsep kebaikan bersama (common good) menjadi nilai sentral dalam etika politik yang menegaskan bahwa tujuan utama politik adalah mewujudkan kesejahteraan dan martabat seluruh anggota masyarakat. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan komitmen yang berkelanjutan terhadap prinsip-prinsip etika, penguatan institusi demokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang terpadu mengenai etika, politik, dan kebaikan bersama sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, inklusif, dan bertanggung jawab dalam masyarakat modern

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Bashori, Z. K. F. (2022). Etika Politik Perspektif Bahtiar Effendy. *PARADIGMA: JURNAL KALAM DAN FILSAFAT*, 4(1), 30–39. <https://doi.org/10.15408/paradigma.v4i2.24256>
- Aristoteles. (2000). *Politics*. Dover Publications.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia.
- Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Farah Sabilla Febriany, dan D. A. D. (2020). NILAI-NILAI PANCASILA DAN DINAMIKA ETIKA POLITIK INDONESIA. *Kinabalu*, 11(2), 50–57.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Heywood, A. (2015). *Political Theory: An Introduction*. Palgrave Macmillan.
- Heywood, A. (2019). *Politics*. Palgrave Macmillan.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.

- K. Bertens. (2000). *Etika*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kant, I. (1968). *Groundwork of the Metaphysics of Morals*,. Harper & Row.
- Kornelius Naitili1, B. N. (2023). ETIKA POLITIK MENURUT FRANZ MAGNIS-SUSENO. *SINODALITAS GEREJA YANG PARTISIPATIF DAN BERPUSAT PADA KRISTUS Seminar Nasional Filsafat Teologi*, 53–63.
- Kymlicka, W. (2002). *Contemporary Political Philosophy*. Oxford University Press.
- Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press.
- Machiavelli, N. (1908). *The Prince*. J.M. Dent & Sons,.
- Plato. (2019). The republic. *Authorship: From Plato to the Postmodern: A Reader*, 19–22. <https://doi.org/10.5840/ancientphil199515218>
- Strang, J. V. (n.d.). Ethics as Politics: On Aristotelian Ethics and its Context. *Plymouth State College*.